



Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Sumedang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Gini ratio merupakan salah satu indikator untuk menilai ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

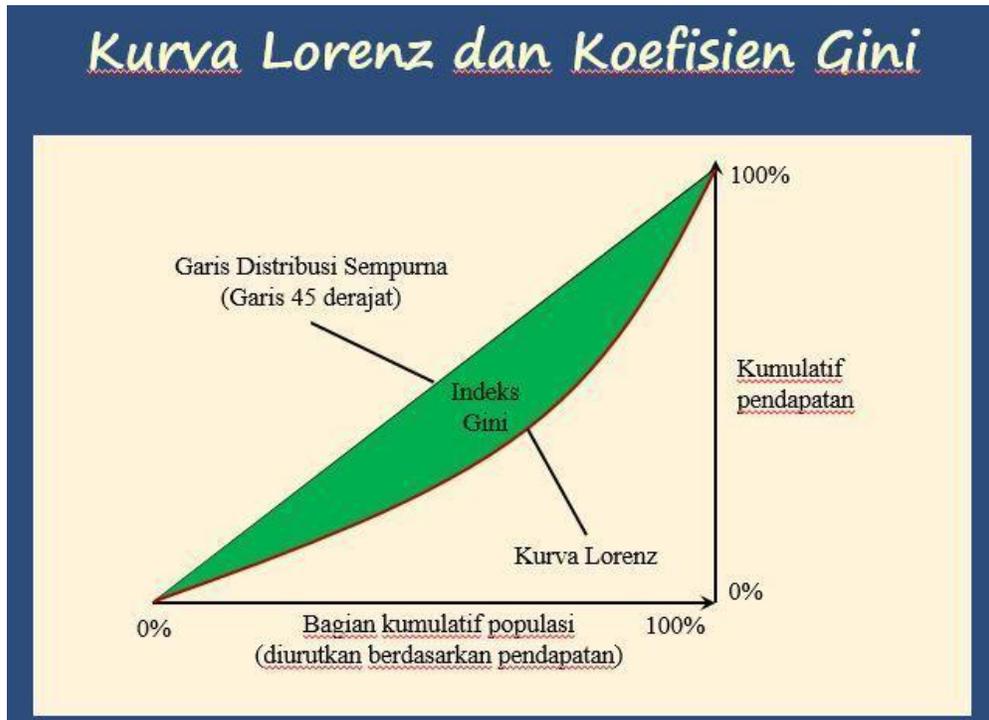
Gini ratio paling umum digunakan sehingga dapat diperbandingkan dengan wilayah lain.



Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya.

Semakin dekat jarak Kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

ruang guru



Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 – 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi



Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia (World Bank)

Klasifikasi Ketimpangan	Ketimpangan distribusi pendapatan
Ketimpangan tinggi	40% penduduk berpendapatan rendah menerima <12% dari total pendapatan
Ketimpangan sedang	40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12% -17% dari total pendapatan
Ketimpangan rendah	40% penduduk berpendapatan rendah menerima >17% dari total pendapatan

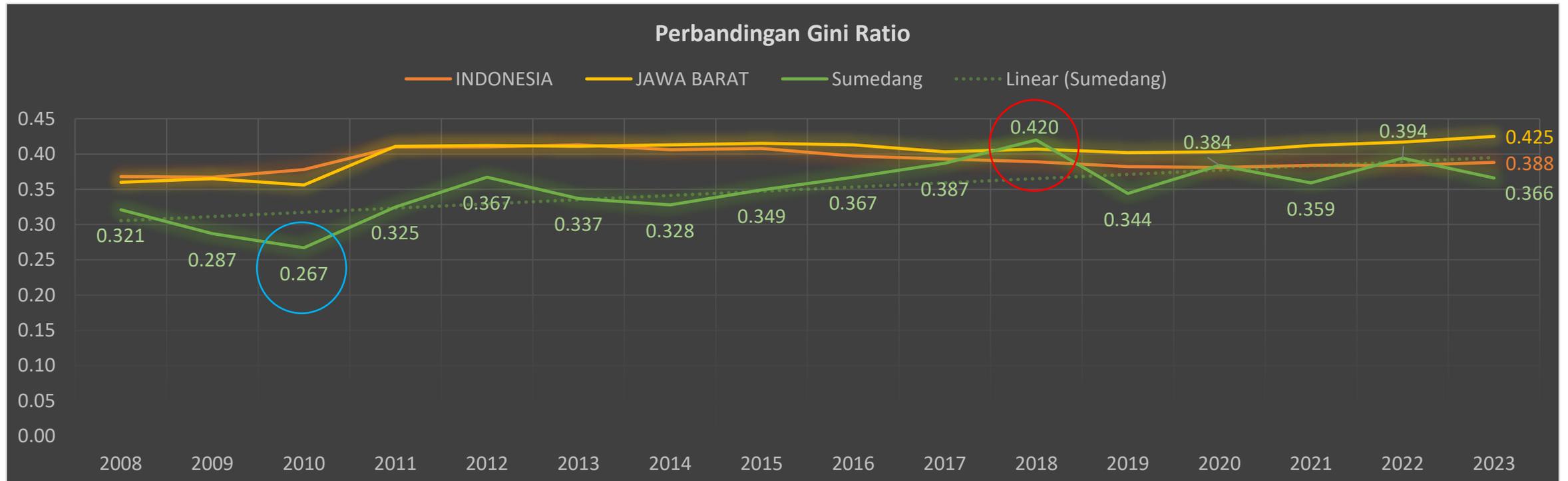
Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan:

40% penduduk dengan pendapatan rendah,
40% penduduk dengan pendapatan menengah,
20% penduduk dengan pendapatan tinggi

Tren Gini Ratio

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang masih berada dalam kategori rendah ($< 0,4$) meski sempat berada di kategori moderat pada 2018 (0,42).

Namun, perlu menjadi perhatian karena tren ketimpangan yang meningkat dan berfluktuatif.

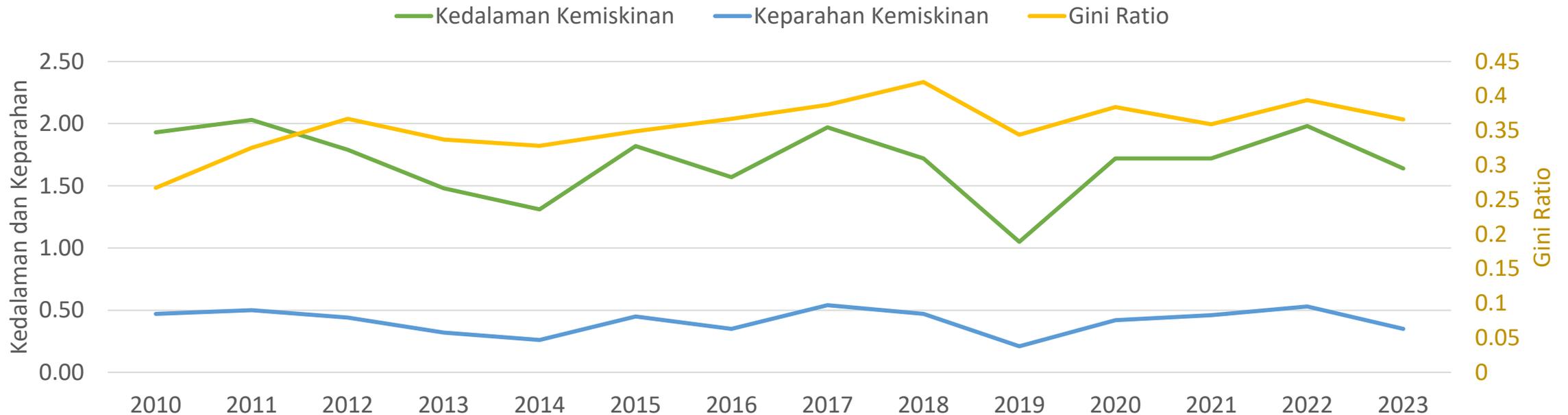


Gini Ratio & Kedalaman Keparahan Kemiskinan

Ketimpangan sejak 6 tahun terakhir memiliki pola yang mirip dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan, dibandingkan dengan Tingkat kemiskinan itu sendiri.

Semakin dalam dan parah kemiskinan berpotensi meningkatkan ketimpangan, dan sebaliknya

Hubungan Gini Ratio dengan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan



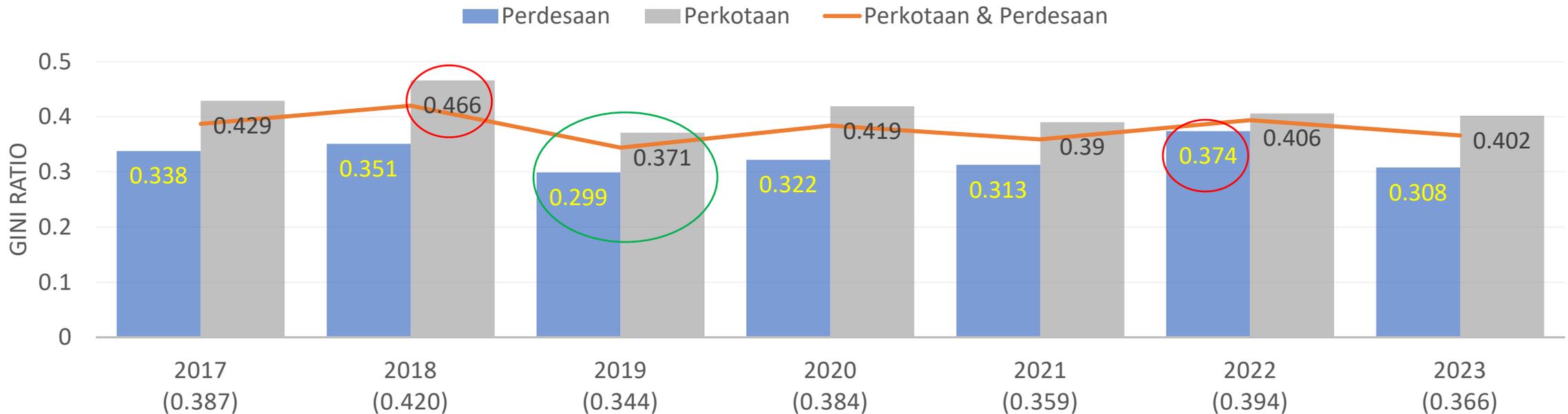
Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan

Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan karena disparitas upah tenaga kerja yang lebih lebar.

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
Kota	300,600	2,605,945	3,321,836	50,000	50,000,000
Desa	213,426	1,941,658	1,497,060	100,000	10,000,000

Sumber Data: BPS-Sakernas 2023 (diolah)

Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Kab. Sumedang



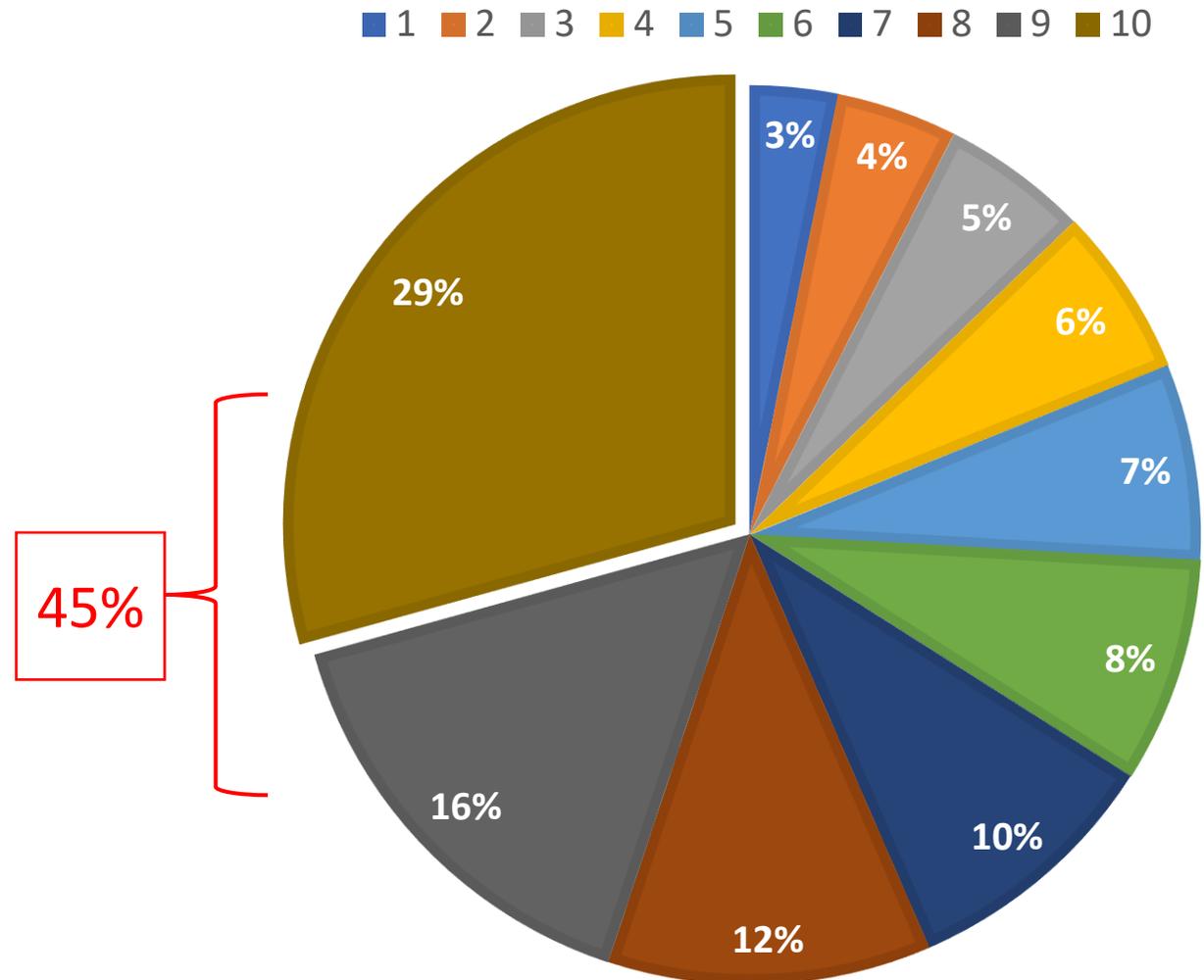
Sumber Data: BPS-Susenas 2017-2023 (diolah)

Ketimpangan antar Desil Pengeluaran

45% atau hampir separuh pendapatan dikuasai oleh 20% kelompok terkaya (desil 9 & 10), sementara 20% kelompok termiskin (desil 1- 2) hanya mendapatkan 7%.

Bahkan, desil 10 menguasai 29% atau hampir 10x dari pendapatan desil 1.

SHARE PENGELUARAN PER KAPITA ANTAR DESIL

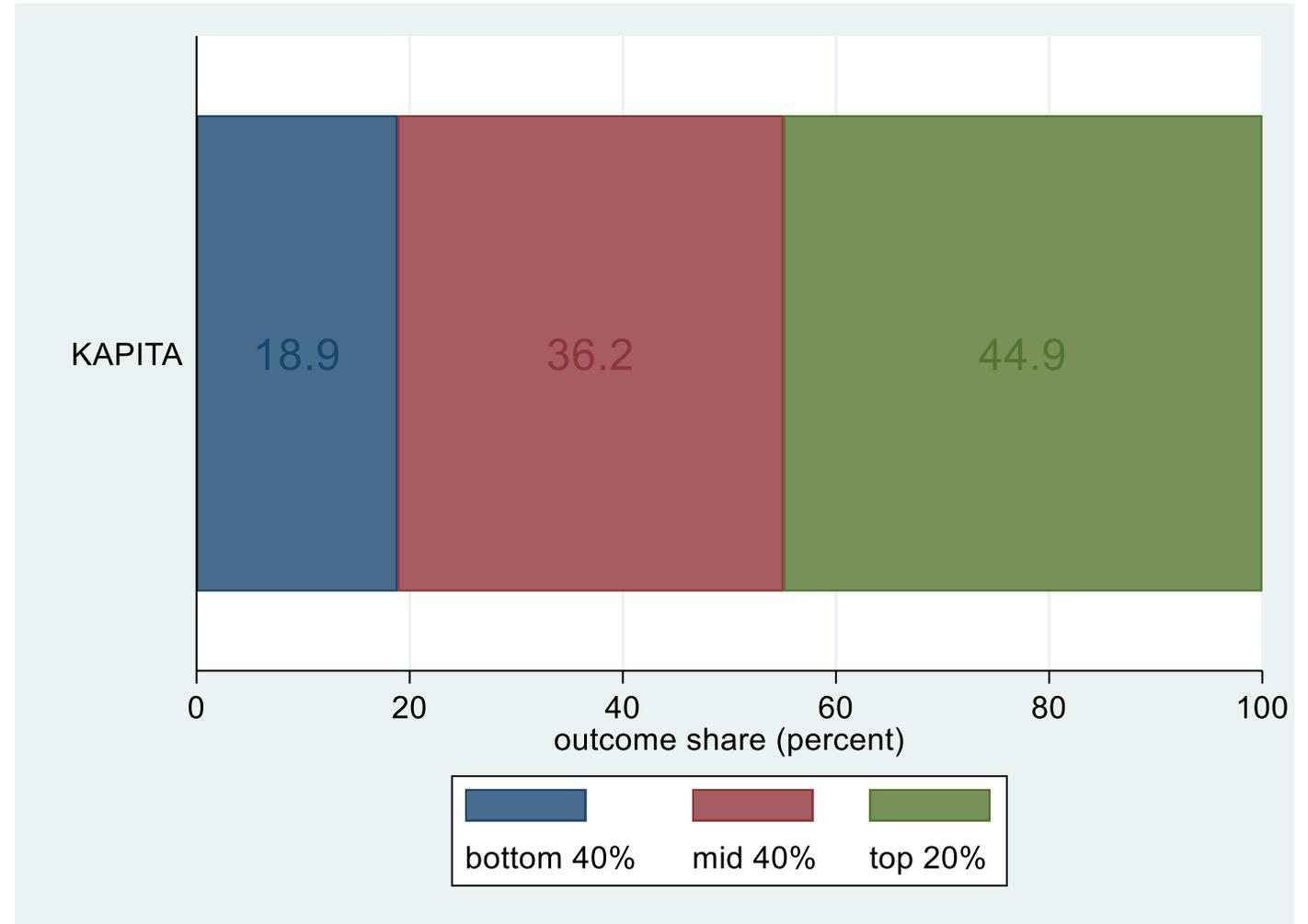


Sumber Data: BPS-Susenas 2023 (diolah)

Ketimpangan versi Bank Dunia

Kelompok 40% (Desil 1-4) memperoleh share pendapatan **18,9%**, artinya lebih dari 17% yang menjadi batas minimum **ketimpangan rendah** menurut versi Bank Dunia.

Pengukuran ini menggunakan **pendekatan pengeluaran**, jika dari diukur dr pendapatan maka akan lebih timpang karena bagi kelompok pendapatan tinggi tidak semua pendapatan dibelanjakan (ada yang ditabung, investasi, dll)



Sumber Data: BPS-Susenas 2023 (diolah)

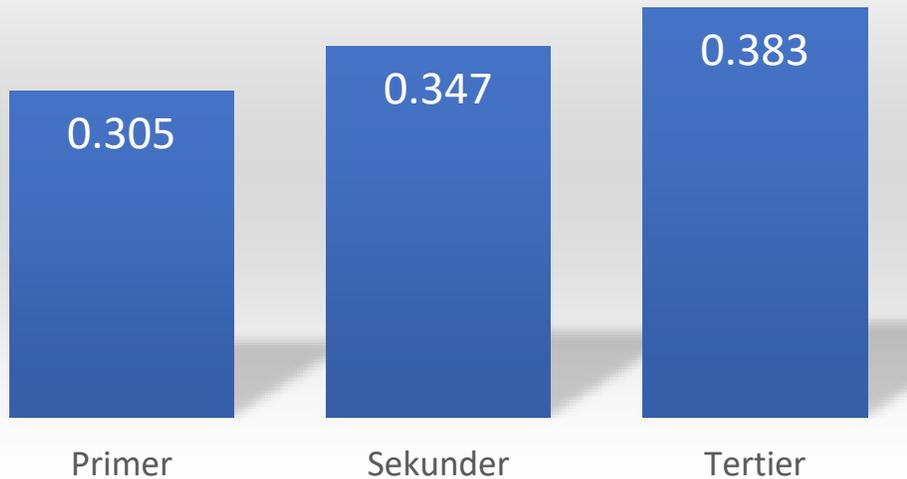
Gini Ratio Sektoral

Sektor Primer, khususnya pertanian memiliki ketimpangan pendapatan lebih rendah namun upah nya juga rendah. Sementara sektor tertier yang berupa perdagangan dan jasa umumnya punya ketimpangan lebih tinggi karena disparitas upah yang juga cukup lebar.

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
Pertanian	105,842	1,290,556	1,353,659	100,000	16,000,000
Industri	90,195	2,504,374	2,303,362	80,000	20,000,000
Perdagangan	96,280	2,670,514	2,719,396	120,000	30,000,000

Sumber Data: BPS-Sakernas 2023 (diolah)

Gini Ratio Sektoral



Gini Ratio Lapangan Usaha Utama

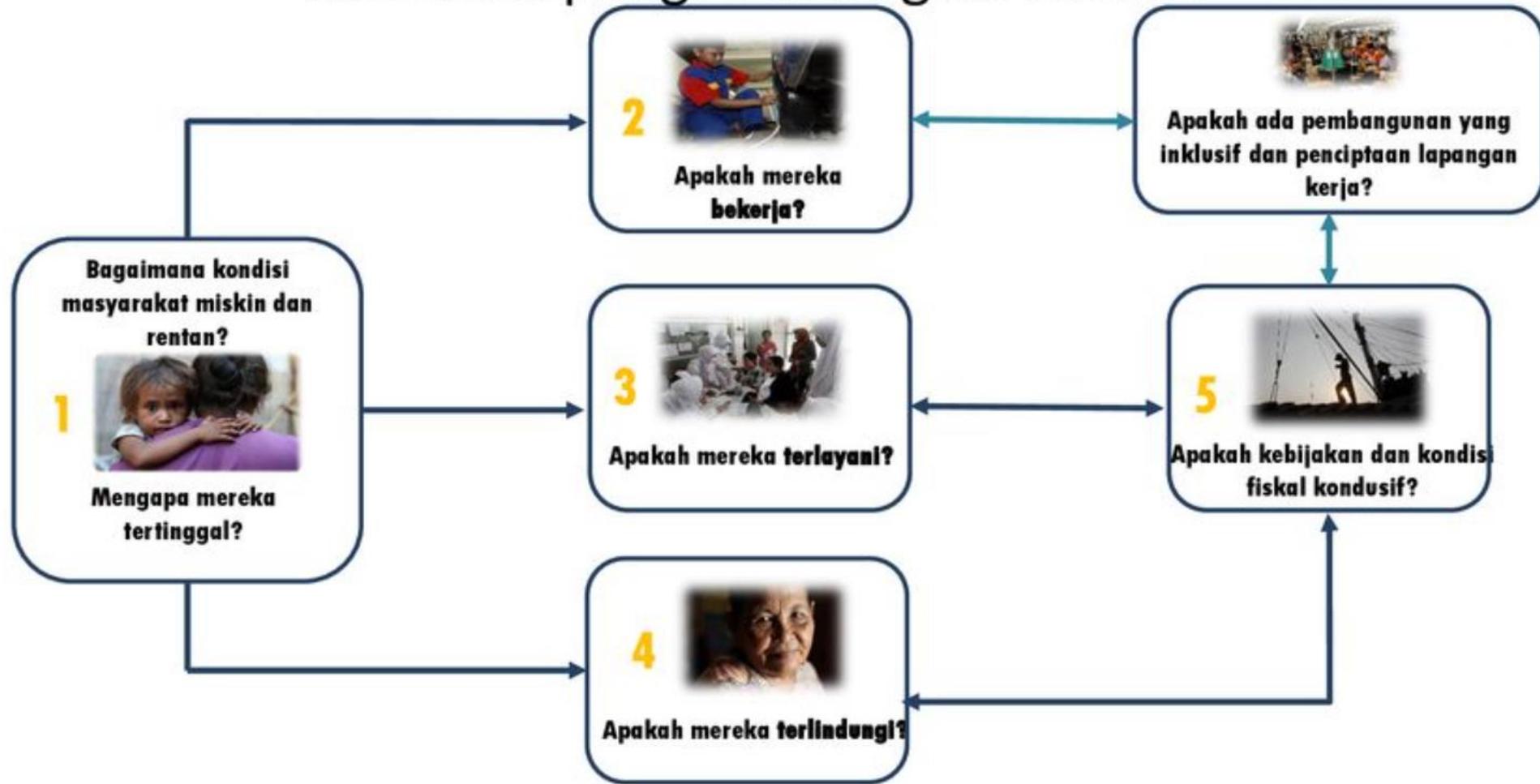


Sumber Data: BPS-Susenas 2023 (diolah)

2 strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan



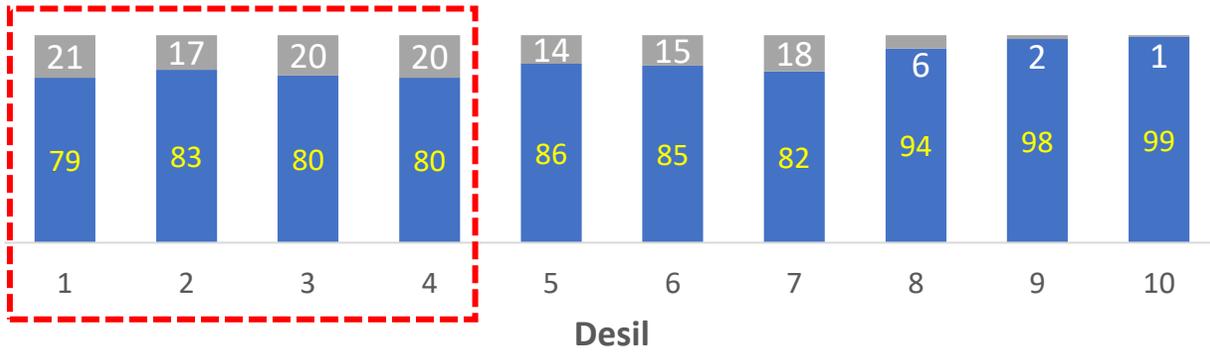
5 pertanyaan kebijakan menanggulangi kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan di tingkat daerah



Perlinsos yang Tidak Tepat Sasaran Berpotensi Meningkatkan Ketimpangan

Proporsi Penerima **PKH** di Setiap Kelas Pendapatan
(Susenas, Maret 2021)

■ Tidak Menerima PKH ■ Menerima PKH



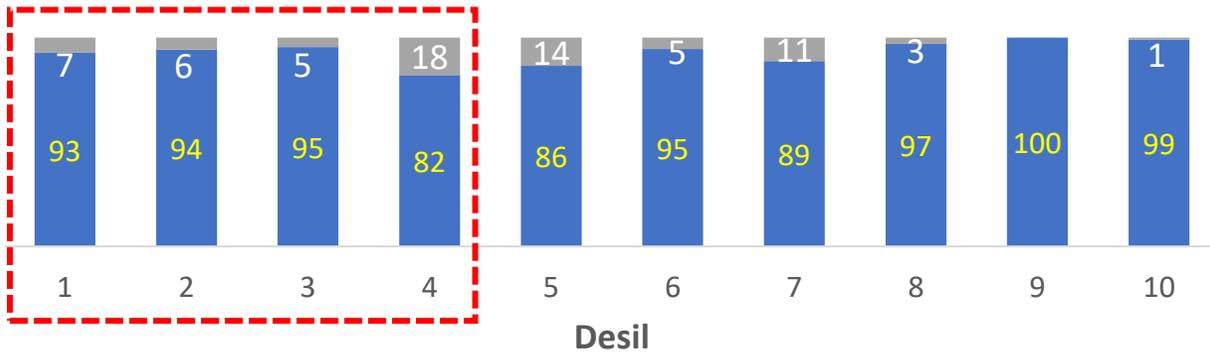
Proporsi Penerima **BPNT** di Setiap Kelas Pendapatan
(Susenas, Maret 2021)

■ Tidak menerima BPNT ■ Menerima BPNT



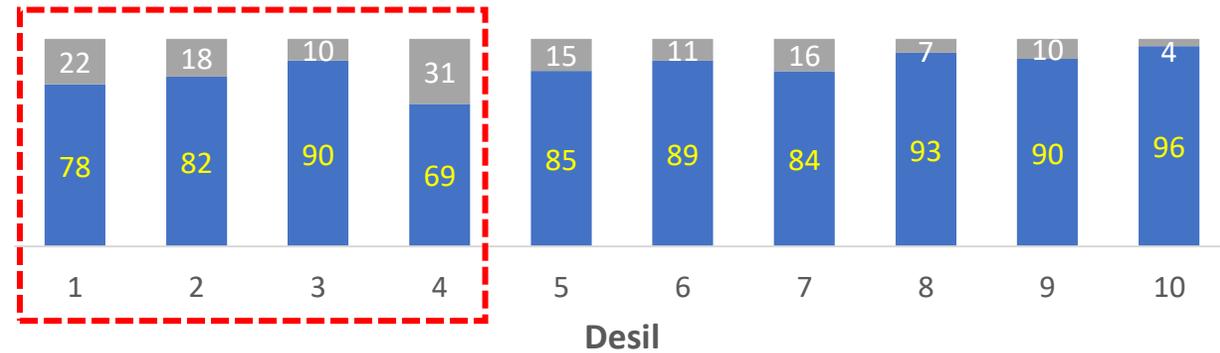
Proporsi Penerima **PIP** di Setiap Kelas Pendapatan
(Susenas, Maret 2021)

■ Tidak Menerima PIP ■ Menerima PIP



Proporsi Penerima **KKS** di Setiap Kelas Pendapatan
(Susenas, Maret 2021)

■ Tidak Menerima KKS ■ Menerima KKS



Berdasarkan data Susenas Maret 2021, distribusi Perlinsos di Sumedang masih kurang efektif diterima oleh rumah tangga pada desil terendah, dimana proporsi penerima perlinsos pada Bottom 40 adalah PIP: 51%, KKS: 57%, PKH: 58%, dan BPNT: 66%.

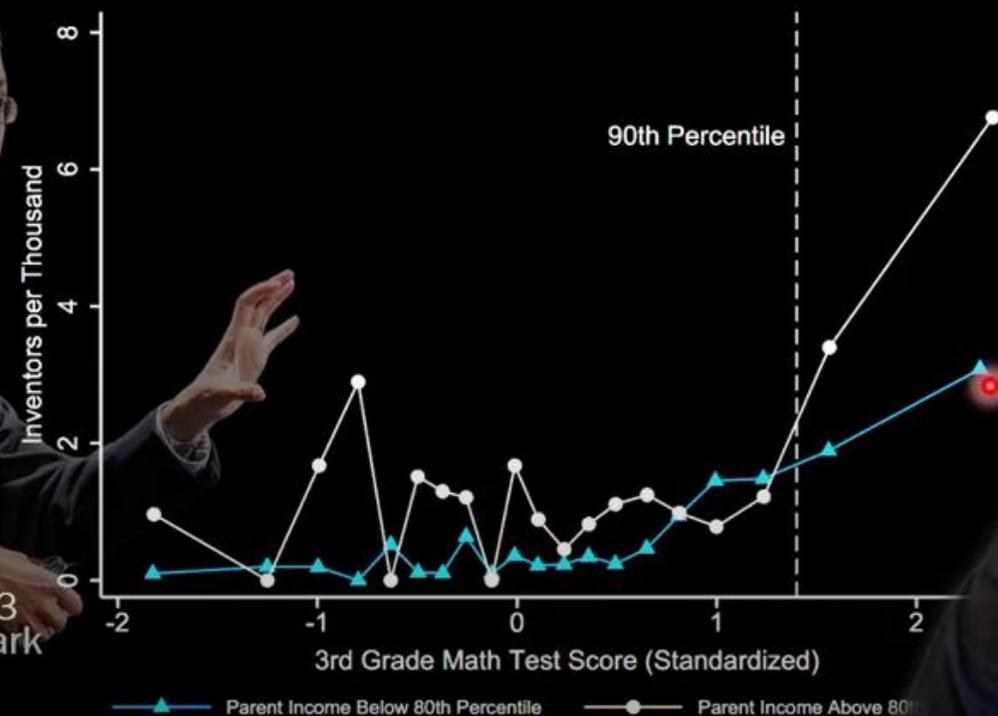
Data jutaan inventor yang ditracking masa sekolahnya, membuktikan bahwa anak-anak dengan potensi yang sama tapi tidak diberi kesempatan yang sama karena perbedaan status sosial maka peluang menjadi inventor jauh lebih kecil, dan dampak pada pertumbuhan ekonomi jadi tidak optimal dibandingkan jika semua anak mendapat kesempatan yang sama maka di kemudian hari akan banyak terlahir inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

The Lost Einstein

672

THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS

(A) By Parental Income



Raj Chetty
(Harvard) 2013
John Bates Clark
Medal



Keadilan Untuk Pertumbuhan

Arief Anshory Yusuf

Rekomendasi Kebijakan untuk Pembangunan Inklusif

- **Ketimpangan** di Sumedang memiliki **tren meningkat** dan dalam 16 tahun terakhir seiring ekonomi yang terus tumbuh sehingga perlu diupayakan menjadi lebih **inklusif**.
- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terjadi jika aktivitas yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi adalah **sektor-sektor yang menguntungkan kelompok menengah bawah**, misalnya sektor pertanian, atau manufaktur yang padat karya (*Keadilan untuk Pertumbuhan – Arief Anshory Yusuf, 2018*)
- Prioritas pembangunan sektoral jika ingin pertumbuhan tinggi namun dapat menurunkan ketimpangan perlu diarahkan pada sektor pertanian yang disinergikan dengan sektor pendukungnya, sejalan dengan misi ke dua dalam RPJPD 2005-2025; **“Mewujudkan Kabupaten Agribisnis yang didukung industri dan pariwisata”**.

Strategi Mengurangi Ketimpangan & Menumbuhkan Ekonomi Desa



Pemerataan infrastruktur layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi



Fokus pembangunan desa pada potensi unggulan (OVOP), dana desa terarah, didukung BUMDes, dan SDM terlatih



Kolaborasi dan sinergi antar desa (hulu-hilir) & stakeholder (pentahelix), serta antar program pusat & daerah



Pembentukan Kawasan agribisnis, agrowisata, dan cluster pendukung yang saling terkoneksi



Perluasan Akses Perdagangan & Pemasaran (Infrastruktur, TIK)



Terima Kasih

Nugrahana F. Ruhyana, SP., ME.
Peneliti Ahli Muda - Bappppeda Kab. Sumedang
nugrahana@gmail.com

